



## PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PASAR ATAS KOTA CIMAH

**Aziiz Fajar Ramadhan<sup>1)</sup>**

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Atas Kota Cimahi". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Pasar Atas Kota Cimahi, serta mengidentifikasi hambatan yang ada dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan informan dari Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan DLH, UPTD Kebersihan, Pengelola Pasar, dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan sampah di pasar ini masih kurang optimal, dengan hambatan utama berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah dan kurangnya fasilitas pendukung. Pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal, dengan penetapan alat ukur yang kurang tepat dan kurang ketatnya pengawasan, sehingga menimbulkan penyimpangan. Selain itu, sanksi yang diterapkan berupa teguran dirasa belum memberikan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Pasar Atas Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar dan program yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup.

### **Abstract**

*This study is titled "Environmental Agency Supervision in Waste Management at Pasar Atas, Cimahi City." The aim of this research is to describe the supervision conducted by the Environmental Agency (DLH) in waste management at Pasar Atas, Cimahi City, and to identify the existing obstacles and the efforts made to overcome them. The research method used is qualitative with a descriptive approach, collecting data through interviews and observations with informants from the Head of the DLH Supervision and Guidance Division, UPTD Cleanliness, Market Managers, and vendors. The findings show that the supervision of waste management at the market is still suboptimal, with the main obstacles being low public awareness of the environmental impacts of waste and the lack of supporting facilities. The supervision conducted has also been insufficient, with improper establishment of measuring tools and weak enforcement, leading to deviations. Additionally, the sanctions applied, such as warnings, have not provided significant deterrent effects. Therefore, waste management at Pasar Atas, Cimahi City, still needs to be improved in order to meet the standards and programs that have been set.*

**Keywords:** Supervision, Waste Management, Environmental Agency

## **PENDAHULUAN**

Pada umumnya suatu negara terdiri dari 2 bagian wilayah utama yaitu, wilayah perkotaan maupun wilayah pedesaan. Perbedaan spesifik di tiap wilayah dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk, fasilitas-fasilitas, struktur ruang, dan lain sebagainya. Suatu kota besar cenderung dihuni oleh penduduk dalam jumlah yang cukup besar dibanding wilayah lainnya, hal ini dikarenakan wilayah perkotaan merupakan pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dengan jumlah penduduk yang cukup besar ini tentu harus diimbangi dengan pemenuhan berbagai kebutuhannya yang dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, politik, ekonomi, lingkungan, budaya serta aspek lainnya. Penumpukan sampah di setiap TPS menjadi hal yang sudah biasa terjadi di kawasan Cimahi karena sampah yang sangat banyak pada pengangkutannya kadang terlihat mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan penimbunan sampah dilokasi tersebut dan penyebab lain ialah juga disebabkan oleh tanpa ada penanganan dari warga setempat yang seharusnya berpartisipasi membuang sampah sesuai waktu yang ditentukan serta peran dari pemerintah kota melalui instansi terkait yang masih dinilai minim pada pengawasan di kawasan tersebut. Selain terdapat penumpukan sampah tentu ada bau busuk yang menyengat akibat dari banyak sampah yang berserakan seperti sampah organik dan nonorganik.

Manusia diartikan juga sebagai faktor utama dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Jika manusia melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dengan baik maka akan menjadi baik dan jika sebaliknya pengelolaan dan pelestarian lingkungannya buruk maka akan menjadi buruk. Agar lingkungan hidup terjaga dengan baik diperlukannya suatu pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan baik. Ada berbagai cara dalam melakukan hal tersebut, salah satunya dengan melaksanakan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan guna meminimalisir dan mengantisipasi persoalan-persoalan mengenai dampak lingkungan hidup.

Dalam upaya melestarikan lingkungan hidup diperlukannya pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama oleh pelaku-pelaku usaha atau kegiatan yang berpengaruh

terhadap perubahan lingkungan hidup. Oleh karena itu pengawasan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh instansi-instansi yang berkepentingan dalam pelaksanaan melestarikan lingkungan hidup. Yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut.

Oleh karena itu, Pemerintah berperan penting dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan penduduk untuk menjamin keberlangsungan hidup yang sejahtera seperti melalui usaha pembangunan, baik fisik maupun non fisik di pusat dan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah bersama dengan pihak swasta maupun masyarakat, memiliki peranan yang saling berkaitan, namun kendali utama tetap berada pada Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan kinerjanya harus menekankan pada pentingnya manajemen pemerintahan yang baik.

Pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri. Kegiatan pembangunan pada berbagai sektor, dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai isu strategis yang sering dihadapi sebagai dampak pembangunan yang salah satunya adalah masalah persampahan, yang apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara) dan tidak tertutup kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya berupa penyebaran penyakit yang berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan seluruh sumber daya yang ada. Hingga saat ini negara berkembang seperti Indonesia masih terbilang sulit mengatasi permasalahan sampah terlebih pada adanya kecenderungan wilayah perkotaannya yang memiliki jumlah penduduk yang banyak termasuk didalamnya penduduk tidak tetap yang melampaui daya dukung lingkungan sehingga jumlah sampah yang dihasilkan cukup banyak pula. Sementara itu, lahan di wilayah perkotaan juga semakin sempit dan mahal sehingga Pemerintah kesulitan menyediakan tempat pembuangan sampah.

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu

dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan. Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Dalam pokok bahasan manajemen, pengawasan menjadi satu rangkaian proses manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang bertujuan untuk menjamin bahwa kesuksesan suatu kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pengawasan dalam pengelolaan sampah merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan pemerintah kota dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu menjaga kebersihan kota. Berkaitan dengan program atau kebijakan yang akan dijalankan oleh suatu organisasi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dibuat dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi, sehingga dapat mencegah kesalahan untuk tidak kembali terjadi sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan akan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Karena itu pengawasan merupakan salah satu faktor keberhasilan pemerintah kota dalam mengatasi persoalan sampah yang hingga kini masih menjadi masalah yang sangat sukar untuk diselesaikan maka perlu ada pengawasan yang dilakukan pemerintah kota melalui instansi terkait yang memiliki tugas melaksanakan program-program yang telah dibuat pemerintah dalam penanggulangan masalah sampah yang hingga kini masih sulit di atasi karena berpengaruh terhadap ikon kota. Dimana masalah sampah merupakan masalah yang terjadi disetiap kota khususnya pada Pasar Atas Kota Cimahi yang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi pada Seksi Angkutan Sampah yang berfungsi sebagai pengelolaan sampah dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Cimahi masih dinilai kurang terutama pada Pasar Atas. Kota Cimahi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki permasalahan terhadap sampah. Permasalahan sampah di Kota Cimahi semakin hari semakin meningkat yang diakibatkan pola pikir masyarakat yang kurang sadar terhadap kesehatan

lingkungan di sekitarnya. Keberadaan sampah di Kota Cimahi sendiri masih mengalami penumpukan sampah salah satunya di Pasar Atas.

Selanjutnya, Patroli Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi mendapati sekitar 200 warga yang masih membuang sampah sembarangan. Patroli tersebut dilakukan di jalan-jalan protokol kota oleh 75 personel DLH. Hingga kini, sampah di kota tersebut belum bisa diangkut ke TPA Sarimukti karena lokasi tersebut belum beroperasi secara normal. Akibatnya, tumpukan sampah liar menjadi-jadi di kota tersebut. (Kamaludin, H. (2023, September Rabu). Ratusan Orang di Cimahi Terjaring OTT Membuang Sampah Sembarangan, Kali Ini Tak Dikenai Sanksi. (J. Pribadi, Ed.))

Melihat dari fenomena di lapangan di kota Cimahi terdapat titik-titik yang menjadi rawan tumpukan sampah, salah satunya tujuan dari penelitian ini yaitu di Pasar Atas, setiap pagi sampah-sampah pada titik rawan tumpukan sampah tersebut tidak dikelola secara optimal, sehingga mengganggu pengguna jalan. Terlebih terdapat pasar dan para pedagang disekitarnya yang beroperasi menambah jumlah masalah sampah semakin meningkat karena pengelolaannya tidak dilakukan secara optimal. Persoalan sampah akibat keberadaan pasar dan para pedagang tersebut sudah terjadi sejak lama, adanya kecenderungan para pelaku usaha tersebut membuang sampah sembarangan dan pengelolaan sampah yang tidak optimal di daerah tersebut, sehingga sampah yang di buang oleh pelaku usaha dibiarkan lama dan menumpuk menjadikan lingkungan kumuh, berbau tidak sedap yang menyengat dan akan berdampak buruk bagi kesehatan. Pada awalnya masyarakat tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Pasar dan para pedagang tersebut, setelah mengalami dampak yang terjadi semenjak berdirinya pasar dan para pedagang di daerah Jalan Pasar Atas banyak menghasilkan sampah. Selain itu lemahnya penegakan hukum tentang pengelolaan persampahan menyebabkan penduduk kota masih banyak yang membuang sampah sembarangan.

Dalam pengawasan terhadap pengelolaan sampah dengan upaya penerapan pengawasan terhadap pengelola pasar dan pelaku usaha, dilaksanakan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Cimahi dan UPTD terkait yang bertugas. Serta penanganan terhadap sampah juga perlu mendapatkan

perhatian yang serius dari berbagai pihak. Karena kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk melestarikan lingkungan khususnya dengan meyelamatkan lingkungan agar tidak tercemar oleh emisi yang berasal dari sampah. Pembuangan sampah sementara, pengangkutan sampah dan pembuangan akhir sampah digerakkan oleh instansi formal yaitu pemerintah. Warga pemukiman dan para pedagang mempunyai peran pada tahap pengumpulan sampah yaitu pengelolaan sampah dilakukan mulai dari sumbernya. Pada tahap ini warga serta pedagang melakukan pemilahan antara sampah kering dan basah, sedangkan sektor informal yaitu pemulung dan pengepul hanya melakukan pengumpulan dan perdagangan sampah kering layak jual yang di dapat dari warga.

Pengawasan yang dilakukan bersifat langsung maupun tidak langsung, pengawasan langsung berarti mereka mengawasi langsung terhadap obyek yang di teliti, sedangkan pengawasan tidak langsung mereka hanya menunggu laporan-laporan dari masyarakat yang merasa di rugikan oleh penumpukan sampah yang meluap ke sisi jalan ini, sedangkan di dalam pengawasan langsung Dinas Lingkungan Hidup hanya mengecek 2 minggu sekali dan itupun kalo dapat laporan dari masyarakat ataupun dari satgas Cimahi Tengah. Akan tetapi pengawasan tersebut belum efektif karena kurangnya tenaga pengawas dalam mengawasi serta kurangnya kesadaran masyarakat serta petugas kebersihan dalam mengelola lingkungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat dari adanya fenomena bahwa Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pengelolaan sampah dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih adanya masyarakat yang masih membuang sampah langsung ke TPS Pasar Atas dengan gejala yang ada, seperti bukti sampah yang meleber ke sisi jalan, dalam penelitian ini akan meneliti mengenai efektif atau tidaknya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pengelolaan sampah di Pasar Atas Kota Cimahi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus secara kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2014)“Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif karena data yang diperoleh dalam bentuk katakata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan menggumpulkan data atau informasi yang berupa hasil teks wawancara, catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, data dari internet”. Bermaksud menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi berdasarkan pada fakta dan objek penelitian. Penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2014) “didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran, holistik dan rumit”.

Adapun jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Tipe penelitian ini adalah penggambaran subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan data yang diperoleh di analisis sehingga hasil penelitiannya dapat memahami fenomena yang terjadi.

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena pada obyek yang akan di teliti, karena peneliti ikut berpartisipasi di lapangan sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik di dalam fenomena mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

Pencemaran terhadap lingkungan yang dihasilkan menjadi faktor utama bagi pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Hal ini merupakan rumusan mengenai menjaga, merawat serta melestarikan lingkungan sebab lingkungan sangat berhubungan dengan sumber daya alam yang harus di dilindung serta tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Dalam menerapkan hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melakukan pengawasan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha terkait pengelolaan sampah yang dihasilkan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Dalam pembahasan kali ini, peneliti melihat sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Lingkungan Hidup. Pada kenyataan dilapangan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi pada dasarnya mempengaruhi terhadap penghasilan sampah yang terjadi. Karena aktivitas masyarakat yang semakin hari semakin banyak akan kebutuhan. Sehingga akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan Kesehatan masyarakat sendiri.

Hal ini perlu dikendalikan, diarahakan dan dibina agar dampak yang terjadi berkurang. Tugas ini tentunya merupakan tugas pemerintah, terutama pemerintah daerah dan pemerintah daerah memberikan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurus lingkungan hidup. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan yang dilakukan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi pengelolaan sampah. Setelah melakukan penelitian terhadap instansi yang berwenang dalam pengawasan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang berlangsung di Kota Cimahi ada beberapa factor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melaksanakannya. Dan beberapa faktor pengawasan pengelolaan sampah di Kota Cimahi terbagi menjadi tiga sesuai dengan dimensi yang

berdampak terhadap variable yang di ambil setelah penelusuran beberapa sampel.

Salah satu standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan program pemerintah Kota Cimahi yang dijalankan saat ini yaitu program Zero Waste yang mana program Zero Waste sendiri mengikuti metode pengelolaan sampah 3R bahkan dalam program itu terdapat 5R. Program Zero Waste, program zero waste ini tidak hanya akan mengurangi sampah baik organik maupun non organik, namun juga mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah.

Prinsip yang digunakan dalam konsep zero waste ini tidak hanya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). namun juga 4R hingga 5R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant*. *Replace* adalah mengganti. Gantilah barang yang kurang ramah lingkungan dengan yang ramah lingkungan, gantilah kemasan plastik dengan kemasan lain yang lebih bersahabat dengan lingkungan. *Replant* atau menanam kembali atau yang sering kita kenal dengan reboisasi. Dengan berjalannya program tersebut maka akan mengurangi dampak sampah yang terjadi, juga memudahkan proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Terkait.

Hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah dapat mempengaruhi dan menjadi penyebab pengawasan kurang efektif. Hambatan masalah yang terjadi didalam pengawasan maupun pengelolaan sampah didasari oleh peningkatan demografi yang mempengaruhi kebutuhan untuk menunjang aktivitas masyarakat, sehingga tidak dapat memperhatikan lingkungan hidup.

Umumnya hambatan tersebut diakibatkan oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai, jumlah sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dari masyarakat, masih minim komitmen dari penanggung jawab pengelola sampah yang kurang sadar akan aturan. Hal ini penyebab pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ini kurang optimal.

Dari hasil wawancara dan analisis peneliti dapat disimpulkan sedikitnya sumber daya manusia memang sangat sulit untuk melakukan pengawasan secara terpadu, ditambah lagi faktor kesadaran masyarakat akan bahaya sampah yang dihasilkan terhadap lingkungan dan kesehatan

masih kurang. Masih minimnya sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukungpun menjadi salah satu penghambat dalam proses pengawasan dan pengelolaan sampah.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Atas Kota Cimahi. Upaya pada dasarnya merupakan langkah atau cara Dinas terkait dalam menjalankan suatu program atau atauran yang berlaku. Sama halnya seperti upaya yang dilakukan dalam pengawasan dan pengelolaan sampah bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah sejalan dengan program yang dijalankan. Berbagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ciimahi dalam mewujudkan lingkungan yang bersih aman. Salah satunya dengan melakukan pengawasa terhadap pengelolaan sampah yang mana bertujuan melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak buruk yang dihasilkan dari sampah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah di Pasar Atas Kota Cimahi maka peneliti menarik kesimpulan yakni:

1. Dalam menetapkan standar pengawasan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pengawasan pengelolaan sampah sesuai dengan aturan dan program yang dijalankan, akan tetapi dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan kurang maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dari sampah, kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai.
2. Dalam mengadakan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam hal ini mengambil sampel dan melakukan pengecekan bagaimana proses pengelolaan sampah sesuai dengan metode yang ditetapkan yang mana mengacu pada program Kota Cimahi yaitu program Zero Waste, tidak hanya 3R bahkan sampai dengan 5R.
3. Mengadakan tindakan perbaikan dengan melaksanakan tindakan perbaikan dengan sanksi yang diberikan. Tindakan perbaikan di berikan untuk menghilangkan penyebab penyimpangan dan ketidak sesuaian untuk mencegah terulang kembali dalam pemberian sanksi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam memberikan sanksi berupa surat teguran yang di berikan kepada pihak pelaku usaha dan pengelola sampah. Jika kesalahan terulang kembali maka akan ditindak lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan hidup. Tindakan

perbaikan yang di lakukan adalah memperketat pengawasan kepada pelaku usaha dan pengelola sampah.

Hambatan yang terjadi pada umumnya dikarenakan kesadaran masyarakat yang kurang akan bahaya sampah pada kesehatan, lingkungan dan Isinya. Juga kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kota Cimahi saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Daryanto. (1995). *Masalah pencemaran*. Bandung: Tarsito.
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3, 1–46
- Handayani, S. (1985). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen* . Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. H. (2013). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Manullang. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen* . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah, Asas Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tujuan Umum Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 3, 1–46.
- Nurcholis, H. (2012). Konsep Dasar Local Government. *Administrasi Pemerintahan Daerah*, 1–55.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sejati, K. (2009). *Pengelolaan Sampah Terpadu* . Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI).
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Bumi Aksara.

- Sucipto, D. C. (2012). *Teknologi Pengelolaan Daur Ulang*. Yogyakarta: Geosyen Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Peneleitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2014). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.